



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN



RENCANA KERJA

DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Alamat: Gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Blok IV Lantai 4
Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat, Telp. (021) 5700242, Fax (021) 5700242 Pswt: 4003



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN

KEPUTUSAN DIREKTUR PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN

NOMOR : SK. 65 /PPH/PPHS/GKM.2/11/2020

TENTANG

**RENCANA KERJA LINGKUP DIREKTORAT PENCEGAHAN
DAN PENGAMANAN HUTAN TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

DIREKTUR PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis lingkup Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Tahun 2020–2024;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Pimpinan Unit Kerja Eselon II atau UPT wajib menyusun rancangan Renstra Unit Kerja Eselon II atau Renstra UPT dengan berpedoman pada Renstra Unit Kerja Eselon I;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan tentang Rencana Strategis lingkup Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Tahun 2020-2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/Menlhk-II/2015 tentang Struktur Organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030;
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;

Keputusan...

7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.333/MENLHK/SETJEN/ SET.1/8/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan Nomor: SK.46/PPH/PPHS/GKM.2/9/2020 tanggal 7 September 2020 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Lingkup Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Tahun 2020-2024; dan
9. Keputusan Direktur Pencegahan dan Penanganan Hutan Nomor: SK.59 /PPH/PPHS/GKM.2/11/2020 tanggal 5 November 2020 tentang Rencana Kerja Lingkup Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN TENTANG RENCANA KERJA DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN TAHUN 2021**
- Kesatu : Rencana Kerja Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Tahun 2021 merupakan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan tahun 2021.
- Kedua : Rencana Kerja Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Tahun 2021 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketujuh : Keputusan Direktur Pencegahan dan Pengamanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Desember 2020

Direktur Pencegahan dan
Pengamanan Hutan,



Ir. Sustyo Iriyono, M.Si.
NIP. 19620621 199002 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Penegakan hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Para Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| DAFTAR GAMBAR | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| PENGANTAR | iv |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. <i>Latar Belakang</i> | 1 |
| 1.2. <i>Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi</i> | 2 |
| 1.3. <i>Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia</i> | 3 |
| BAB II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 DAN PROGNOSIS TAHUN 2020 | 7 |
| 2.1. <i>Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2019 dan Prognosis Tahun 2020</i> | 7 |
| 2.2. <i>Capaian Serapan Anggaran Tahun 2019 dan Prognosis Tahun 2020</i> | 12 |
| BAB III. RENCANA KERJA TAHUN 2021 | 15 |
| 3.1. <i>Strategi dalam Mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional</i> | 15 |
| 3.2. <i>Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Output Kegiatan, Uraian Kegiatan dan Anggaran 2021</i> | 17 |
| 4.1. <i>Kerangka Pendanaan</i> | 20 |
| BAB V. PENUTUP | 21 |
| LAMPIRAN I. MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021 | 22 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1 Struktur organisasi Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan | 4 |
| Gambar 2 Capaian luas kawasan hutan yang berhasil diamankan tahun 2015 - 2019 | 8 |
| Gambar 3 Volume kayu yang diamankan pada kegiatan operasi peredaran hasil hutan tahun 2015 - 2019..... | 9 |
| Gambar 4 Jumlah TSL yang diamankan pada tahun 2015 - 2019..... | 10 |
| Gambar 5 Hasil kegiatan sosialisasi dan operasi penyelamatan DAS Citarum | 11 |
| Gambar 6 Grafik perbandingan realisasi anggaran Dit. PPH tahun 2015 – 2019 | 13 |
| Gambar 7 Kegiatan dan indikator/output Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan | 17 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1 Realisasi pencapaian kinerja Direktorat PPH Tahun 2019..... | 7 |
| Tabel 2 Jumlah kegiatan operasi tahun 2015 - 2019..... | 9 |
| Tabel 3 Daftar pengadaan barang dan jasa..... | 10 |
| Tabel 4 Prognosis pencapaian kinerja Direktorat PPH Tahun 2020..... | 12 |
| Tabel 5 Realisasi pencapaian kinerja Direktorat PPH Tahun 2019..... | 13 |
| Tabel 6 Realisasi penyerapan anggaran Direktorat PPH Tahun 2020..... | 14 |
| Tabel 7 Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan sebagai dasar Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan | 17 |
| Tabel 8 Rencana kegiatan Prioritas Nasional tahun 2021..... | 17 |
| Tabel 9 Komponen untuk masing-masing output..... | 18 |
| Tabel 10 Pohon Kinerja Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan..... | 18 |
| Tabel 11 Target Kinerja Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan pada Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan di Direktorat PPH dan UPT | 19 |
| Tabel 12 Target Kinerja Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan pada Direktorat PPH dan UPT..... | 19 |
| Tabel 13 Target Kinerja Kegiatan Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan..... | 19 |
| Tabel 14 Kerangka pendanaan Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan pada Direktorat PPH sampai level komponen..... | 20 |

PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas petunjuk dan ilmu-Nya, buku Rencana Kerja Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan (Renja Direktorat PPH) Tahun 2021 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak internal yang telah berperan aktif dalam penyusunan Renja Direktorat PPH Tahun 2021 baik secara moral, material maupun spiritual. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, atas pencermatan dan masukan yang membangun untuk memperkaya isi dan meningkatkan kualitas Renja Direktorat PPH Tahun 2021.

Proses penyusunan Renja Direktorat PPH Tahun 2021 ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Tahun 2020–2024 dan berpedoman pada Peraturan Menteri LHK No. P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Lingkup KLHK. Penyusunan Renja Direktorat PPH Tahun 2021 diawali dengan berbagai diskusi lingkup Direktorat PPH. Mengingat isu dan permasalahan terkait keamanan hutan sangat dinamis dan dapat berubah mengikuti perkembangan target dan prioritas, maka bisa jadi dalam tahap selanjutnya dokumen ini juga akan mengalami penyesuaian.

Dengan tersusunnya Renja Direktorat PPH Tahun 2021, upaya pencegahan dan pengamanan hutan untuk tahun 2021 telah memiliki arah kebijakan dan strategi yang jelas dalam rangka mendukung tercapainya target Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK, target Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, target pembangunan nasional serta visi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, kami sajikan buku Renja Direktorat PPH Tahun 2021 dan semoga segala sumbangsih yang telah kita berikan dinilai sebagai ibadah oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang.

DIREKTUR PENCEGAHAN DAN
PENGAMANAN HUTAN

The image shows a circular official stamp of the Directorate General of Forest Protection and Security (DJPPT). The stamp contains the text 'KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN' and 'DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Ir. SUSTYO IRIYONO, M.Si.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja merupakan rencana pelaksanaan pembangunan nasional jangka pendek yang dikonstruksikan sebagai panduan arah dan tujuan suatu organisasi pemerintahan dalam periode satu tahun. Buku ini merupakan turunan dari hasil rancangan Renstra Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan yang merupakan salah satu unit kerja Eselon II di bawah Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam rangka mengimplementasikan Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Nasional Tahun 2020-2024, Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan berusaha mewujudkannya melalui pembangunan yang terstruktur, sistematis dan berkelanjutan dimana hanya dapat tercapai dengan perencanaan yang baik sesuai yang dimandatkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Secara garis besar, perencanaan pembangunan ini terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dengan periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 5 (lima) tahunan, serta perencanaan pembangunan periode tahunan.

Terdapat 4 (empat) pilar pada RPJMN 2020-2024 yang kemudian diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan. Tujuh agenda pembangunan tersebut diuraikan lebih lanjut ke dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Salah satu agenda pembangunan RPJMN, yakni Agenda Pembangunan ke 6 (enam) berkaitan langsung dengan pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup. Agenda tersebut ialah Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Agenda inilah yang menjadi panduan penyusunan Renstra Kementerian LHK dan dielaborasi lebih mendalam melalui Renstra unit kerja Eselon I dan unit kerja Eselon II.

Sebagai upaya dalam pencapaian cita-cita besar bangsa ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) beserta seluruh unit kerjanya harus menyusun strategi yang cermat dan jitu agar cita-cita tersebut dapat menjadi realitas. Sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, setiap kementerian dan lembaga pemerintahan wajib menyusun dokumen perencanaan kerja untuk periode 5 (lima) tahun yang dituangkan menjadi Rencana Strategis (Renstra) dan perencanaan kerja tahunan yang dituangkan menjadi Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan tugas dan fungsi yang berpedoman pada RPJMN. Tujuannya adalah untuk menjamin agar seluruh kegiatan dan tindakan yang dilakukan berjalan efektif, efisien, dan sejalan dengan pencapaian tujuan yang diharapkan.

Kementerian LHK telah melakukan langkah awal dengan menyusun dokumen Renstra Tahun 2020-2024 sesuai dengan PERMEN PPN/Kepala Bappenas Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata

Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Renstra ini kemudian diturunkan kepada unit-unit kerja dibawahnya untuk disusun pada tingkat unit kerja dan dijadikan acuan dalam penyusunan Renja.

Teknis penyusunan Renja Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan 2020- 2024 bertitik-tolak dari uraian tugas, fungsi dan kewenangan, hasil evaluasi kinerja, serta tantangan pada periode sebelumnya, aspirasi pemangku kepentingan terkait dengan pemenuhan kebutuhan barang dan layanan publik, pengarusutamaan gender dan perubahan iklim, serta prediksi kondisi yang ingin diubah untuk tahun yang akan datang di lingkup Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan.

Saat ini ada beberapa isu yang menjadi fokus utama penyusunan rencana strategis kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan. Beberapa masalah yang mengemuka pada periode tahun 2015 – 2019 adalah adanya ancaman dan gangguan bidang kehutanan meliputi perambahan kawasan hutan (penggunaan kawasan tidak sah), pertambangan tanpa izin dalam kawasan hutan, kebakaran hutan, peredaran ilegal tumbuhan dan satwa liar serta pembalakan liar.

Dalam rangka penanganan permasalahan tersebut di atas, memerlukan keterlibatan dan kerjasama dengan stakeholder (Pemerintah, Swasta, Lembaga Non Pemerintah dan masyarakat). Permasalahan kehutanan yang semakin kompleks dan sarat dengan kepentingan memerlukan adanya strategi yang tepat. Upaya penegakan hukum bidang kehutanan agar terus dilakukan dengan menerapkan beberapa instrumen mulai dari pencegahan, pengamanan, penerapan sanksi administrasi, perdata dan penegakan hukum pidana.

Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan (Direktorat PPH) sebagai penanggungjawab kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan telah berkomitmen untuk memberantas perusakan hutan yang terjadi di Indonesia. Ruang lingkup kegiatan Direktorat PPH mencakup kegiatan preventif dan represif, terus dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, koordinasi dan kerjasama, operasi intelijen/pulbaket, operasi pengamanan peredaran TSL dan hasil hutan, operasi pemulihan kawasan hutan, serta kegiatan dukungan operasional melalui peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana pengamanan.

1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Perubahan atas Permenhut Nomor P.40/Menhut-II/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, pada Pasal 1162 di dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan mempunyai tugas pokok **melaksanakan**

penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan pencegahan dan pengamanan hutan.

Adapun pada Pasal 1163 dijabarkan bahwa untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1162, Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan;
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan;
3. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan;
4. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan;
5. bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervise pelaksanaan urusan pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan yang dilaksanakan di daerah; dan
6. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi direktorat maka mandat Undang-undang yang diemban oleh Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan adalah:

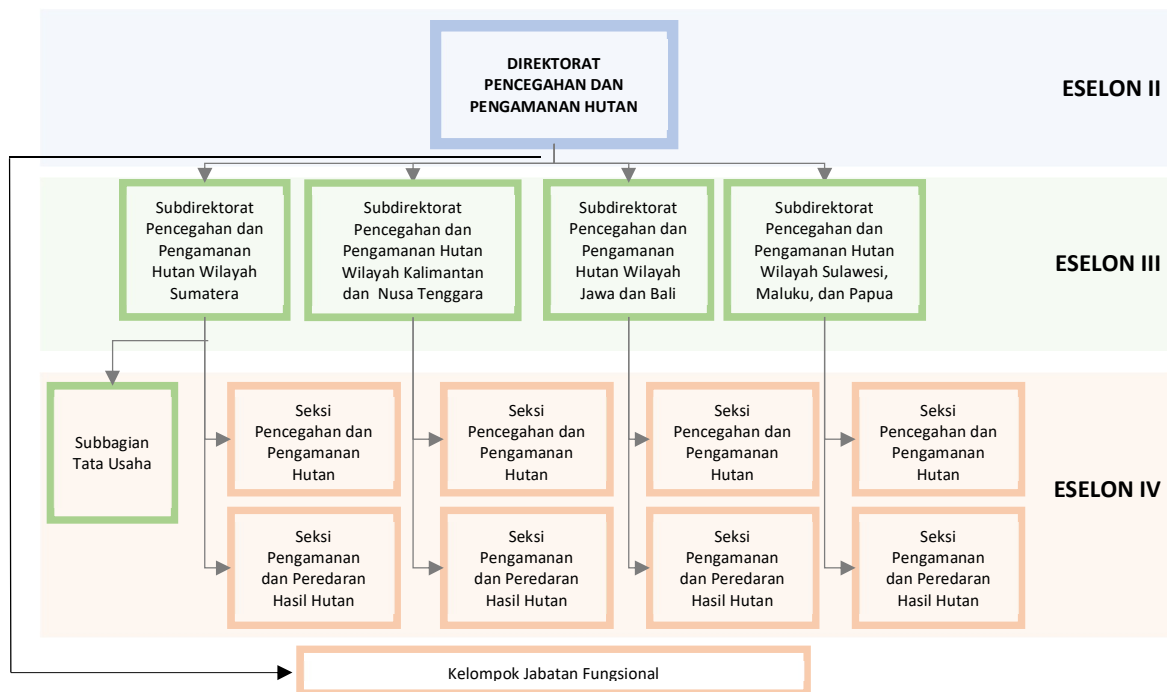
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya
2. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

1.3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Organisasi dan tata kerja Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Perubahan atas Permenhut Nomor P.40/Menhut-II/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, adalah sebagai berikut:

1. Sub Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Wilayah Sumatera yang membawahi :
 - a. Seksi Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Sumatera
 - b. Seksi Pengamanan Peredaran Hasil Hutan Wilayah Sumatera
2. Sub Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Wilayah Jawa dan Bali yang membawahi :
 - a. Seksi Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Jawa dan Bali
 - b. Seksi Pengamanan Peredaran Hasil Hutan Wilayah Jawa dan Bali

3. Sub Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara yang membawahi:
 - a. Seksi Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara
 - b. Seksi Pengamanan Peredaran Hasil Hutan Wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara
4. Sub Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua yang membawahi :
 - a. Seksi Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua
 - b. Seksi Pengamanan Peredaran Hasil Hutan Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua
5. Sub Bagian Tata Usaha, yang secara administratif dan fungsional di bawah binaan Kepala Sub Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Wilayah Sumatera



Gambar 1 Struktur organisasi Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan

Jumlah SDM di Direktorat PPH secara keseluruhan sebanyak 46 orang yang terdiri atas 10 orang perempuan dan 36 orang laki-laki dengan komposisi 33 orang PNS dan 13 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri. Komposisi latar belakang pendidikan SDM Direktorat PPH yaitu S2 sebanyak 11 orang, S1 sebanyak 28 orang, SMA sebanyak 6 orang dan SD sebanyak 1 orang. Komposisi SDM berdasarkan golongan PNS, terdiri atas 10 orang Golongan IV, 22 orang Golongan III dan 1 orang Golongan II.

Jabatan struktural lingkup Direktorat PPH sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 1, diisi oleh 1 orang pejabat Eselon II, 4 orang pejabat Eselon III dan 9 orang pejabat Eselon IV. Sumber daya manusia yang mendukung penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan khususnya dalam penanganan kejahatan kehutanan adalah Polisi Kehutanan (Polhut)

termasuk Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC), dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Jabatan fungsional Polisi Kehutanan yang ada di Direktorat PPH diisi oleh 10 orang.

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.5/Menhut-II/2010 tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan, dijelaskan bahwa jenis peralatan yang menjadi standar bagi Polisi Kehutanan terdiri atas alat dan sarana. Jenis alat yang menjadi standar yang harus dilengkapi bagi Polisi Kehutanan adalah:

1. senjata api dan amunisi;
2. alat komunikasi;
3. alat navigasi;
4. alat dokumentasi dan intelijen;
5. alat pemadam kebakaran; dan
6. alat pendakian, selam dan penyelamatan.

Jenis sarana yang menjadi standar yang harus dilengkapi bagi Polisi Kehutanan adalah:

1. sarana mobilisasi;
2. pos dan pondok jaga;
3. tempat penyimpanan barang bukti;
4. tempat penyimpanan senjata dan amunisi;
5. tempat/ruang tahanan; dan
6. asrama Polhut.

Semua peralatan polisi kehutanan yang ada di KLHK hampir semuanya sudah terpenuhi, namun dari sisi kuantitas masih kurang seperti senjata api dan amunisi. Untuk sarana yang masih menjadi kendala adalah belum adanya tempat penyimpanan barang bukti dan tempat/ruang tahanan yang memadai. Demikian pula untuk asrama Polhut belum ada di semua UPT dan sarana mobilisasi yang ada masih kurang, baik kendaraan patroli roda dua maupun roda empat banyak yang perlu diperbaharui karena usia kendaraan sudah lebih dari 10 tahun.

Pada 21 Desember 2016, Nota Kesepahaman tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pengendalian Perubahan Iklim telah ditandatangani oleh Kementerian LHK dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KNPPA). Komitmen Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK terhadap pencapaian PUG lebih lanjut diterjemahkan melalui *Roadmap* Pengarusutamaan Gender Nomor P.2/PHLHK/Setjen/SET.1/5/2020 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mengacu pada komitmen Kementerian LHK tersebut, kelembagaan PUG menjadi salah satu instrumen yang dibutuhkan dalam implementasi PUG yang ditandai dengan adanya kelompok kerja (POKJA) dan *focal point* di masing-masing organisasi yang tengah menyusun sebuah rencana aksi nasional berupa roadmap PUG.

Dalam kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan telah memperhatikan kesetaraan gender diantaranya melalui:

1. Memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk menjadi Polhut.
2. Mengikutsertakan Polhut laki-laki dan perempuan dalam pembentukan Polhut dan SPORC.
3. Memberikan kesempatan kepada laki-laki dan perempuan mengikuti latihan menembak.
4. Memberikan kesempatan kepada laki-laki dan perempuan untuk mengikuti Diklat Intelijen.
5. Memberikan apresiasi kepada Polhut laki-laki dan perempuan yang memiliki pengalaman, kemampuan dan kinerja yang baik (Contoh : pada Apresiasi Wanalestari untuk Polhut).
6. Penyediaan sarana dan prasarana di lapangan dan di kantor sebagai upaya *responsive gender*.
7. Meminimalisir anggapan *stereotype* terhadap segala bentuk kegiatan/pekerjaan.
8. Pelibatan masyarakat umum dengan memperhatikan kesetaraan gender sebagai upaya untuk mendukung kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan.

BAB II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 DAN PROGNOSIS TAHUN 2020

2.1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2019 dan Prognosis Tahun 2020

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2019

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran, capaian pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2019 dapat dijabarkan sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1 Realisasi pencapaian kinerja Direktorat PPH Tahun 2019

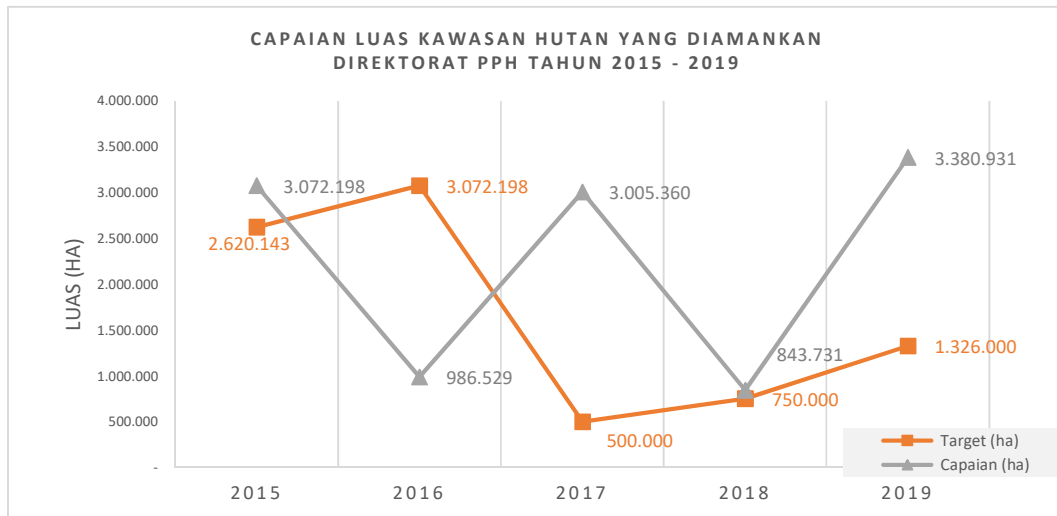
| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|---|--|--------------|-----------------|-------------|
| 1 | Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Terhadap Gangguan dan Ancaman Bidang Kehutanan di 34 Provinsi | Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli, dan operasi | 1.326.000 Ha | 3.373.974,50 Ha | 100 |
| | | Luas DAS Citarum yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi | 5.000 Ha | 58.034,83 Ha | 100 |
| | | Sarana prasarana pencegahan dan pengamanan hutan memenuhi standar minimum | 1 Lokasi | 1 Lokasi | 100 |
| 2 | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHLHK | Layanan dukungan manajemen satker | 1 Layanan | 1 Layanan | 100 |
| | | Layanan perkantoran | 1 Layanan | 1 Layanan | 100 |

Capaian Kinerja I Luas Hutan yang Diamankan dari Gangguan dan Ancaman Bidang Kehutanan Melalui Kegiatan Sosialisasi, Patroli, dan Operasi Tahun 2019

Selama periode tahun 2015-2019, Direktorat PPH telah mencapai target kinerja luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan. Secara keseluruhan capaian luas kawasan hutan yang diamankan dalam kurun waktu 2015-2019 dapat dilihat dalam Gambar 2. Pada periode tahun 2015, target kinerja luas hutan yang diamankan dicapai melalui kegiatan operasi dan patroli yang dilakukan oleh Direktorat PPH bekerjasama dengan UPT Direktorat Jenderal KSDAE dan Dinas yang membidangi kehutanan.

Pada tahun 2016, terjadi penghematan anggaran pada lingkup Kementerian LHK yang menyebabkan kegiatan pengamanan hutan diturunkan anggarannya sehingga target semula kawasan hutan yang diamankan seluas tiga juta hektar hanya dapat dicapai seluas 986.529 ha. Disamping itu pada tahun 2016, penghitungan luas kawasan yang diamankan hanya didasarkan atas luas kawasan hasil kegiatan operasi, luas area kegiatan patroli tidak lagi

menjadi bagian dalam penghitungan kinerja Direktorat Penegakan Hukum LHK karena hasil kegiatan patroli telah menjadi target kinerja tersendiri pada Direktorat Jenderal KSDAE.



Gambar 2 Capaian luas kawasan hutan yang berhasil diamankan tahun 2015 - 2019

Setelah terbentuknya Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Balai PPHLHK) pada tahun 2017, target kegiatan luas hutan yang diamankan dilaksanakan oleh Direktorat PPH bersama dengan Balai PPHLHK. Dengan anggaran yang terbatas, adanya tambahan tenaga pengamanan hutan di daerah melalui Balai PPHLHK telah menyebabkan pencapaian kinerja luas hutan yang diamankan jauh melebihi target yang telah ditentukan sebesar 500.000 ha, dengan capaian sebesar 3.005.360 ha.

Pada tahun 2018, target capaian luas kawasan hutan yang diamankan tidak lagi hanya berada di pusat (Direktorat PPH) melainkan dibagi menjadi enam bagian yaitu untuk Direktorat PPH dan lima Balai PPHLHK. Target kinerja luas kawasan hutan yang diamankan pada Direktorat PPH tahun 2018 sebesar 750.000 ha dapat dicapai melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat PPH dengan nilai capaian 843.731 ha.

Selanjutnya pada tahun 2019, target kinerja luas kawasan hutan yang diamankan oleh Direktorat PPH bertambah menjadi 1.326.000 ha dan dapat dicapai dengan capaian luas sebesar 3.380.931 ha. Luas kawasan hutan diamankan pada tahun 2019 melonjak sangat besar disebabkan atas keberhasilan kegiatan operasi yang mengamankan hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan Papua dan diangkut ke Surabaya dan Makassar. Sumber kayu diduga berasal dari kawasan hutan di Kota Sorong Provinsi Papua Barat dan kawasan hutan di Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Kerom Provinsi Papua. Capaian luas kawasan hutan yang diamankan dari kegiatan operasi pengamanan peredaran hasil hutan tersebut diperkirakan dari luas kawasan hutan sumber kayu ilegal dimaksud pada sekitar wilayah Kota Sorong, Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Kerom.

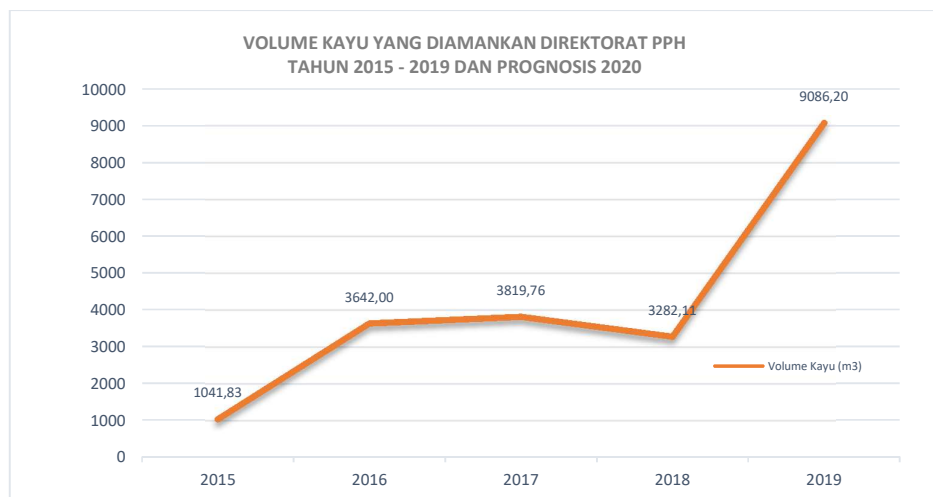
Pada tahun 2015 dan 2016, kegiatan operasi diselenggarakan oleh Direktorat PPH bekerjasama dengan UPT Direktorat KSDAE dan Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan. Sementara pada tahun 2017, kegiatan operasi telah didukung oleh lima Balai PPHLHK sehingga pelaksanaan kegiatan operasi dapat diselenggarakan pada beberapa lokasi dalam waktu yang hampir simultan, tidak lagi menunggu tenaga dari pusat.

Pada tahun 2018, Balai PPHLHK telah menjadi satuan kerja tersendiri sehingga penghitungan jumlah kegiatan operasi yang semula pada tahun 2017 seluruhnya dihitung sebagai kegiatan yang diselenggarakan pusat (Direktorat PPH), penghitungan pada tahun 2018-2019 menjadi terbagi antara pusat dan lima Balai PPHLHK berdasarkan instansi penyelenggara dan penganggaran yang digunakan. Secara keseluruhan, jumlah kegiatan operasi yang dilaksanakan oleh Direktorat PPH beserta lima Balai PPHLHK dalam kurun waktu 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 2 Jumlah kegiatan operasi tahun 2015 - 2019

| Tahun | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Operasi pemulihan kawasan hutan | 27 | 18 | 137 | 217 | 84 |
| Operasi peredaran TSL | 38 | 65 | 68 | 76 | 45 |
| Operasi pembalakan liar | 25 | 39 | 88 | 172 | 163 |
| Jumlah Operasi | 90 | 122 | 293 | 465 | 292 |

Secara keseluruhan, operasi pembalakan liar dan peredaran hasil hutan yang dilakukan Direktorat PPH pada tahun 2015-2019 telah berhasil mengamankan kayu sebanyak 20.871,91 m³. Pada tahun 2019, volume kayu ilegal yang diamankan melonjat tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini didorong oleh keberhasilan dalam pelaksanaan operasi pengamanan peredaran hasil hutan kayu ilegal yang berasal dari Papua dan Papua Barat pada awal tahun 2019. Perbandingan volume kayu yang diamankan dari tahun 2015 - 2019 dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 3 Volume kayu yang diamankan pada kegiatan operasi peredaran hasil hutan tahun 2015 - 2019

Akumulasi hasil operasi peredaran TSL yang dilaksanakan Direktorat PPH pada tahun 2015 sampai tahun 2019 berhasil mengamankan satwa liar sejumlah 217.995 ekor dan 11.608 buah bagian tubuh satwa liar. Pada tahun 2018, Direktorat PPH dan Mabes Polri berhasil mengamankan 4,46 ton Lola Merah/Kerang Susu Bundar dan 44,46 Kg Sisik Penyuu di Kota Sorong Provinsi Papua Barat. Keberhasilan tersebut menyebabkan lonjakan jumlah TSL yang diamankan pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Perbandingan jumlah TSL yang diamankan dari tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 4 Jumlah TSL yang diamankan pada tahun 2015 - 2019

Capaian Kinerja II Sarana Prasarana Pencegahan Dan Pengamanan Hutan Memenuhi Standar Minimum Tahun 2019

Pengadaan sarana prasarana pada tahun 2019 telah dilakukan pada 1 lokasi sebagaimana target yang telah ditetapkan yaitu pada kantor Direktorat PPH sehingga realisasasi kinerja mencapai 100%. Pengadaan meliputi perlengkapan pengamanan hutan, peralatan intelijen, dan pengadaan seragam Polhut dan SPORC dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini.

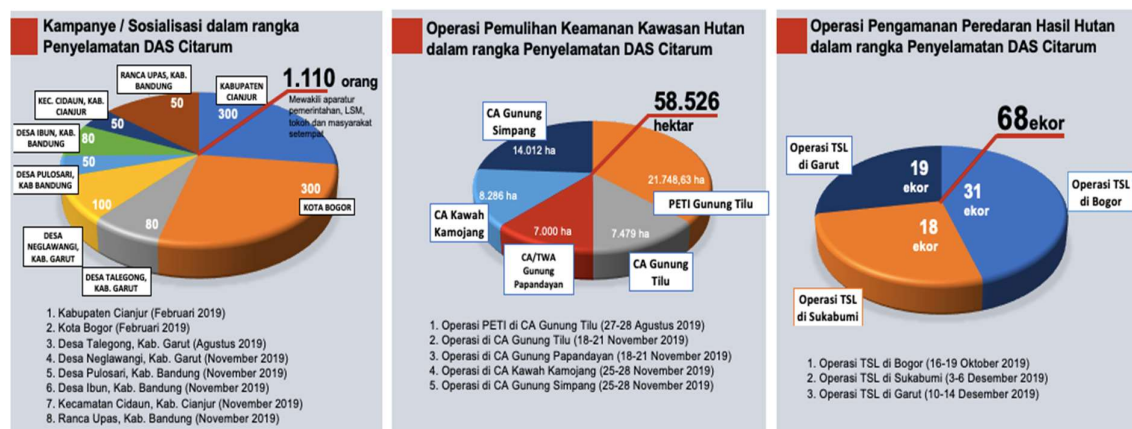
Tabel 3 Daftar pengadaan barang dan jasa

| No. | Uraian | Jumlah |
|----------|---|-------------|
| A | Pengadaan Bangunan, Peralatan dan Mesin | |
| 1 | Server Opsroom | 1 set |
| 2 | Laptop | 2 unit |
| 3 | Printer warna | 4 unit |
| 4 | AC portable | 1 unit |
| 5 | Dispenser | 2 unit |
| 6 | Coffee maker | 1 unit |
| 7 | Printer | 5 unit |
| 8 | Kursi kantor | 1 unit |
| 9 | LCD portable mini | 3 unit |
| 10 | Air Cooler | 1 unit |
| 11 | Microwave | 1 unit |
| B | Pengadaan Bahan Seragam Polhut dan SPORC | |
| 1 | Bahan kain seragam PDL Polhut | 5.300 meter |

| No. | Uraian | Jumlah |
|----------|--|-------------|
| 2 | Bahan kain seragam PDL SPORC | 1.400 meter |
| C | Pengadaan Seragam Lapangan Direktorat PPH | |
| 1 | Baju seragam | 50 unit |
| 2 | Sepatu | 50 unit |
| 3 | Celana | 50 unit |

Capaian Kinerja III Luas DAS Citarum yang Diamankan dari Gangguan dan Ancaman Bidang Kehutanan Melalui Kegiatan Sosialisasi, Patroli dan Operasi Tahun 2019

Direktorat PPH bersama Satgas Citarum telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Operasi pemulihan keamanan kawasan hutan di Hulu DAS Citarum dengan capaian luas kawasan yang diamankan 58.526 Ha.



Gambar 5 Hasil kegiatan Sosialisasi dan Operasi Penyelamatan DAS Citarum

Capaian Kinerja IV Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja Tahun 2019

Layanan dukungan manajemen satuan kerja telah dilaksanakan dengan baik selama 12 bulan dengan realisasi kinerja sebesar 100%, mencakup kegiatan:

1. Penyusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran
Kegiatan mencakup penyusunan RKAKL Direktorat PPH tahun 2020, evaluasi anggaran dan penatausahaan BMN Direktorat PPH.
2. Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan
Kegiatan mencakup pengelolaan Satuan Pengawas Intern Pemerintahan, penyusunan Laporan Tahunan/Lakip Direktorat PPH, Penyusunan Analisa Beban Kerja dan pemutakhiran data pegawai Direktorat PPH.

Capaian Kinerja V Layanan Perkantoran Tahun 2019

Layanan perkantoran telah dilaksanakan selama 12 bulan sesuai dengan target sehingga realisasi kinerja sebesar 100%. Pelaksanaan layanan perkantoran berupa kebutuhan sehari-

hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor, biaya operasional pimpinan dan pembayaran terkait operasional kantor.

Prognosis Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2020

Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan mengalami perubahan di Tahun 2020 karena adanya pandemi Coronavirus – 19 (COVID-19). Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan dimaksud merupakan tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun 2020 dan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor S.267/SETJEN/ROCAN/ SET.1/420 tanggal 21 April 2020 perihal Penyampaian dan Persetujuan Penggunaan Anggaran (PA) terhadap Penghematan Kementerian LHK TA 2020. Prognosis Capaian Kinerja Tahun 2020 sebagaimana dijabarkan pada Tabel berikut.

Tabel 4 Prognosis pencapaian kinerja Direktorat PPH Tahun 2020

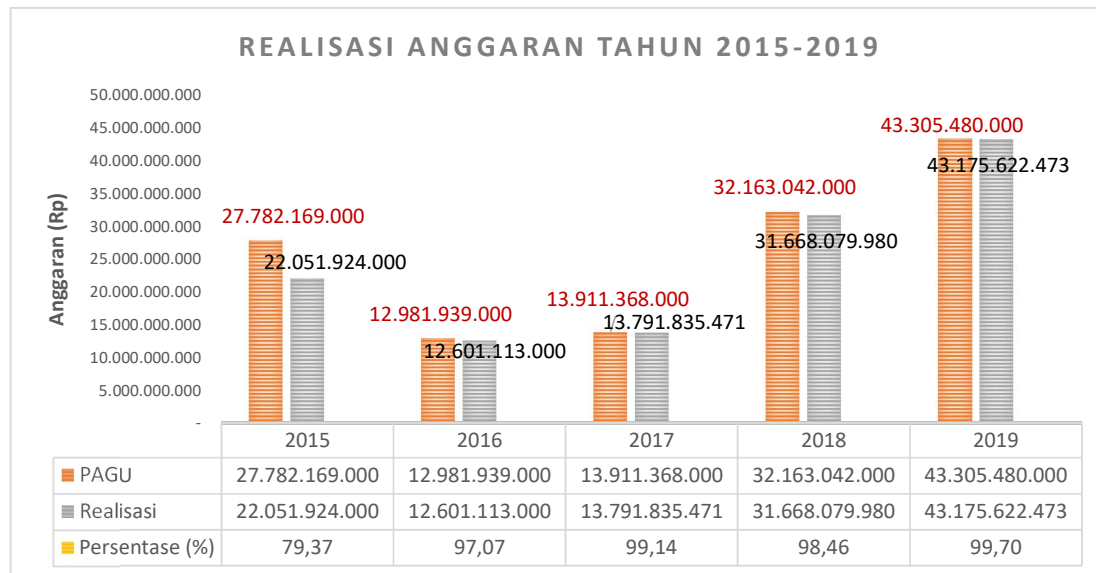
| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target Semula | Target Perubahan | Prognosis Capaian | Capaian (%) |
|------------------|---|--|---------------|------------------|-------------------|--------------|
| 1 | Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Terhadap Gangguan dan Ancaman Bidang Kehutanan di 34 Provinsi | Luas kawasan hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan | 1.276.000 Ha | 350.000 Ha | 234.786 Ha | 67,08 |
| | | Jumlah Operasi Peredaran Hasil hutan Illegal | 18 Operasi | 12 Operasi | 14 Operasi | 100 |
| 2 | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Layanan perkantoran Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 100 |
| Rata-Rata | | | | | | 89,02 |

2.2. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2019 dan Prognosis Tahun 2020

Capaian Serapan Anggaran Tahun 2019

Realisasi anggaran Direktorat PPH pada tahun 2019 secara keseluruhan sebesar Rp.43.175.622.473,- (Empat puluh tiga milyar seratus tujuh puluh lima juta enam ratus dua

puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah). Apabila dibandingkan dengan target anggaran yaitu sebesar Rp. 43.305.480.000,- (Empat puluh tiga milyar tiga ratus lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), terlihat bahwa penyerapan anggaran mencapai 99,70%. Persentase serapan anggaran pada tahun 2019 merupakan yang tertinggi pada lima tahun terakhir.



Gambar 6 Grafik perbandingan realisasi anggaran Dit. PPH tahun 2015 – 2019

Pada tahun 2019, anggaran per IKK telah terealisasi dengan persentase serapan 99,70%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berlangsung dengan baik dan telah menggunakan sumber daya secara optimal. Besarnya realisasi anggaran per IKK tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 5 Realisasi pencapaian kinerja Direktorat PPH Tahun 2019

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | PAGU (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|----|---|--|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Terhadap Gangguan dan Ancaman Bidang Kehutanan di 34 Provinsi | Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli, dan operasi | 28.701.163.000 | 28.648.302.168 | 99.82 |
| | | Luas DAS Citarum yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi | 2.381.160.000 | 2.367.208.142 | 99.41 |
| | | Sarana prasarana pencegahan dan pengamanan hutan memenuhi standar minimum | 9.867.677.000 | 9.867.339.644 | 100.00 |

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | PAGU (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|--------------|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 2 | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHLHK | Layanan dukungan manajemen satker | 375.000.000 | 368.371.800 | 98.23 |
| | | Layanan perkantoran | 1.980.480.000 | 1.924.400.719 | 97.17 |
| Total | | | 43.305.480.000 | 43.175.622.473 | 99.70 |

Prognosis Serapan Anggaran Tahun 2020

Sesuai dengan Surat Persetujuan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : KT.1/MENLHK/SETJEN/SET.1/4/2020, berikut Perubahan Anggaran Semula dan Menjadi Direktorat Jenderal GAKKUM KLHK TA 2020, dan Prognosis Serapan Anggaran hingga 31 Desember 2020, sebagaimana dijabarkan dalam Tabel berikut.

Tabel 6 Realisasi penyerapan anggaran Direktorat PPH Tahun 2020

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | PAGU Semula (Rp) | PAGU Perubahan (Rp) | Prognosis Capaian | Capaian (%) |
|------------------|---|--|------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 1 | Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Terhadap Gangguan dan Ancaman Bidang Kehutanan di 34 Provinsi | Luas kawasan hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan | 29.263.307.000 | 17.603.588.000 | 17,564,609,005 | 99.78 |
| | | Jumlah Operasi Peredaran Hasil hutan Illegal | 10.642.756.000 | 6.323.675.000 | 6,309,672,713 | 99.78 |
| 2 | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Layanan perkantoran Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan | 1.468.080.000 | 1.468.080.000 | 1,464,829,283 | 99.78 |
| Rata-Rata | | | | | | 99.78 |

BAB III. RENCANA KERJA TAHUN 2021

3.1. Strategi dalam Mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional

Sasaran strategis pembangunan KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh Kementerian LHK pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak (*impact*) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup Kementerian LHK selama tahun 2020-2024.

Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian LHK adalah:

- a. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - *High Conservation Values*);
- b. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan *Bioprospecting*, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;
- c. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;
- d. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan, (2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum, (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif, (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

Sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Renstra Kementerian LHK 2020-2024 merupakan kondisi yang ingin dicapai selama lima tahun mendatang dari gabungan beberapa program yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di dalam lingkungannya. Berdasarkan hal itu, Kementerian LHK menetapkan sebanyak 20 (dua puluh) IKU. Sasaran Strategis Kementerian LHK yang diturunkan langsung terhadap Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK adalah **sasaran strategis ke-empat**, yaitu **“Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan**

Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing”.

Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan langsung untuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK adalah IKU 14 yakni **“Jumlah Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Ditangani melalui Penegakan Hukum”**, **“Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi”** dan IKU 18 yaitu **“Opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian LHK”** yang berlaku kepada semua kegiatan Dukungan Manajemen. Meski demikian, secara tidak langsung Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK turut berkontribusi terhadap IKU dan Sasaran Strategis lainnya.

Sasaran dan Indikator Program Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK adalah sebagai berikut:

Sasaran Program 1

Teramankannya hutan dari gangguan dan ancaman

Indikator Program 1

Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman

Sasaran Program 2

Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan

Indikator Program 2

Persentase pelaku usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan terkait bidang LHK meningkat

Sasaran Program 3

Terselesaikannya kasus penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan

Indikator Program 3

Jumlah kasus yang dilakukan penegakan lingkungan hidup dan kehutanan

Sasaran Program 4

Meningkatnya tata kelola pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima

Indikator Program 3

Nilai SAKIP Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan hidup

Mengikuti prinsip *logic model*, bahwa untuk mencapai dampak yang lebih besar, apabila ada hasil yang bersifat lebih spesifik harus diperoleh terlebih dahulu dengan jangka waktu yang lebih pendek dan lebih mudah untuk diukur. Sasaran kegiatan pada tingkat Eselon II Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan merupakan turunan dari sasaran program Eselon I Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK. Sasaran kegiatan Direktorat disusun dengan nama Kegiatan yaitu Pencegahan dan Pengamanan Hutan, yang masuk di bawah Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 7 Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan sebagai dasar Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan

| SASARAN STRATEGIS 4 KEMENTERIAN LHK | INDIKATOR KINERJA UTAMA 14 KEMENTERIAN LHK | PROGRAM 2 KEMENTERIAN LHK | SASARAN PROGRAM 2 DITJEN PHLHK | INDIKATOR PROGRAM 2 DITJEN PHLHK |
|--|--|---------------------------------|---|--|
| Terseleenggaranya tata kelola & inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing | Jumlah Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Ditangani melalui Penegakan Hukum | Pengelolaan Hutan Berkelanjutan | Teramankannya hutan dari gangguan dan ancaman | Jumlah luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman |

Kegiatan Prioritas Nasional yang dilaksanakan Direktorat PPH tahun 2021 adalah Politik, Hukum dan Pertahanan Keamanan yang terdiri atas dua target output sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 8 Rencana kegiatan Prioritas Nasional tahun 2021

| Prioritas Nasional | Program | Kegiatan | Output |
|--|--|---------------------------------------|--|
| Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air | 12. Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 5428. Pencegahan dan Pengamanan Hutan | 001. Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi (Hektar) 002. Luas hutan DAS Citarum yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi (Hektar) |

3.2. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, *Output* Kegiatan, Uraian Kegiatan dan Anggaran 2021

Sasaran program Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK yang terkait dengan bidang pencegahan dan pengamanan hutan adalah Sasaran Program 2. Selanjutnya sasaran dan indikator program akan dijabarkan dalam sasaran aktivitas dan elemen kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan. Sasaran kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan yaitu terlaksananya operasi pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan. Sasaran kegiatan tersebut dilengkapi dengan tiga indikator kegiatan, sebagaimana tercantum pada Gambar 8.



Gambar 7 Kegiatan dan indikator/output Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan

Komponen kegiatan untuk mencapai tiga indikator/output dari Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan dapat dilihat dalam Tabel 3.

Tabel 9 Komponen untuk masing-masing output

| No. | Output | Komponen |
|-----|--|--|
| 1. | Operasi Pengamanan Kawasan Hutan | 1. Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Kawasan Hutan |
| | | 2. Operasi Pengamanan Hutan |
| | | 3. Operasi Penyelamatan SDA |
| | | 4. Operasi Pengamanan Kawasan Hutan di DAS Citarum |
| | | 5. Sosialisasi Pengaman DAS Citarum |
| 2. | Operasi Peredaran Hasil Hutan Ilegal | 1. Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan Ilegal |
| | | 2. Operasi Pembalakan Liar |
| | | 3. Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar |
| | | 4. Penyusunan Bahan Penyiapan NSPK |
| | | 5. Sosialisasi dan Kerjasama Pencegahan dan Pengamanan Hutan |
| | | 6. Penguatan Sistem Intelijen |
| | | 7. Dukungan Teknis Pencegahan dan Pengamanan Hutan |
| 3. | Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan | 1. Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan LHK |

Kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan sebagai bagian dalam Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, terdiri atas tiga indikator kinerja kegiatan yang dijabarkan dalam beberapa komponen sebagaimana tertera pada Tabel 4.

Tabel 10 Pohon Kinerja Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan

| Indikator Kinerja Program | Satuan Target | Indikator Kinerja Kegiatan | Satuan Target | Komponen | Satuan Target | | |
|---|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------|
| Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman | Hektar | 1. Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan | Operasi | 1. Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Kawasan Hutan | Laporan | | |
| | | | | 2. Operasi Pengamanan Hutan | Operasi | | |
| | | | | 3. Operasi Penyelamatan SDA | Operasi | | |
| | | | | 4. Operasi Pengamanan Kawasan Hutan di DAS Citarum | Operasi | | |
| | | | | 5. Sosialisasi Pengaman DAS Citarum | Laporan | | |
| | | 2. Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Ilegal | Operasi | 1. Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan Ilegal | Operasi | 1. Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan Ilegal | Laporan |
| | | | | | | 2. Operasi Pembalakan Liar | Operasi |
| | | | | | | 3. Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar | Operasi |
| | | | | | | 4. Penyusunan Bahan Penyiapan NSPK | Laporan |
| | | | | | | 5. Sosialisasi dan Kerjasama Pencegahan dan Pengamanan Hutan | Laporan |
| | | | | | | 6. Penguatan Sistem Intelijen | Laporan |
| | | | | | | 7. Dukungan Teknis Pencegahan dan Pengamanan Hutan | Laporan |
| 3. Jumlah Polhut yang ditingkatkan Kapasitasnya | Orang | 1. Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan LHK | Orang | 1. Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan LHK | Orang | | |

Dalam rangka mencapai target kinerja program luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman, telah disusun rencana pencapaian target luas hutan yang diamankan dari ancaman dan gangguan pada tingkat pusat yang dilaksanakan oleh Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan tahun 2021 sebesar 390.000 Ha berdasarkan target yang tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis Direktorat PPH Tahun 2020-2024 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 11 Target Kinerja Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan pada Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan di Direktorat PPH dan UPT

| Indikator Kinerja Program | Target (Hektar) | | | | |
|---|-----------------|---------|---------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Luas hutan yang diamankan dari ancaman dan gangguan | 350,000 | 390,000 | 442,000 | 442,000 | 442,000 |

Pengukuran pencapaian target kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan didasarkan atas tiga Indikator Kinerja Kegiatan. Rencana pencapaian Kinerja Kegiatan tahun 2021 yaitu 24 Operasi Pengamanan Kawasan Hutan, 23 Operasi Peredaran Hasil Hutan dan 21 Polhut yang Ditingkatkan Kapasitasnya, sebagaimana tercantum dalam Tabel 6. IKK Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya pada tahun 2020 masih merupakan bagian dari IKK Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan yaitu Komponen Dukungan Teknis Pencegahan dan Pengamanan Hutan. Setelah diadakannya *review* RPJMN oleh Bappenas, Sekretariat Jenderal KLHK dan DJA Kementerian Keuangan, telah disetujui untuk membuah satu output baru yaitu Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan, sehingga mulai tahun 2021 ada penambahan IKK baru yaitu Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya.

Tabel 12 Target Kinerja Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan pada Direktorat PPH dan UPT

| Indikator Kinerja Kegiatan | Target (Operasi) | | | | |
|--|------------------|------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan | 27 | 24 | 24 | 27 | 30 |
| Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan | 13 | 23 | 29 | 33 | 37 |
| Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya | 0 | 21 | 23 | 25 | 28 |

Rincian komponen kegiatan yang akan dilaksanakan pada tingkat pusat oleh Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan tahun 2021, sebagaimana dijabarkan dalam Tabel 7.

Tabel 13 Target Kinerja Kegiatan Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan | Komponen | Target Kinerja Kegiatan | Satuan Target |
|-----|---|---|-------------------------|---------------|
| 1 | Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan | Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Kawasan Hutan | 25 | Laporan |
| | | Operasi Pengamanan Hutan | 12 | Operasi |
| | | Operasi Penyelamatan SDA | 9 | Operasi |
| | | Operasi Pengamanan Kawasan Hutan di DAS Citarum | 3 | Operasi |
| | | Sosialisasi Pengaman DAS Citarum | 2 | Laporan |
| | | Total | 24 | Operasi |

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan | Komponen | Target Kinerja Kegiatan | Satuan Target |
|-----|--|---|-------------------------|----------------|
| 2 | Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Ilegal | Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan Ilegal | 25 | Laporan |
| | | Operasi Pembalakan Liar | 13 | Operasi |
| | | Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar | 10 | Operasi |
| | | Penyusunan Bahan Penyiapan NSPK | 1 | Laporan |
| | | Sosialisasi dan Kerjasama Pencegahan dan Pengamanan Hutan | 1 | Laporan |
| | | Penguatan Sistem Intelijen | 3 | Laporan |
| | | Dukungan Teknis Pencegahan dan Pengamanan Hutan | 7 | Laporan |
| | | Total | 23 | Operasi |
| 3 | Jumlah Polhut yang ditingkatkan Kapasitasnya | Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan LHK | 21 | Orang |

4.1. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan di pusat (Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan) mengacu kepada kerangka pendanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024. Kerangka pendanaan pada tingkat komponen di lingkup Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan pada tahun 2020-2024 sebagaimana dijabarkan pada Tabel 10.

Tabel 14 Kerangka pendanaan Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan pada Direktorat PPH sampai level komponen

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan | Komponen | Anggaran (Rp) |
|-----|--|---|-----------------------|
| 1 | Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan | Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Kawasan Hutan | 1,500,000,000 |
| | | Operasi Pengamanan Kawasan Hutan | 3,000,000,000 |
| | | Operasi Penyelamatan SDA | 4,600,000,000 |
| | | Operasi Pengamanan Kawasan Hutan di DAS Citarum | 750,000,000 |
| | | Sosialisasi Pengaman DAS Citarum | 140,000,000 |
| | | Total | 9,990,000,000 |
| 2 | Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Ilegal | Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan Ilegal | 450,000,000 |
| | | Operasi Pembalakan Liar | 700,000,000 |
| | | Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar | 600,000,000 |
| | | Penyusunan Bahan Penyiapan NSPK | 250,000,000 |
| | | Sosialisasi dan Kerjasama Pencegahan dan Pengamanan Hutan | 375,000,000 |
| | | Penguatan Sistem Intelijen | 1,000,000,000 |
| | | Dukungan Teknis Pencegahan dan Pengamanan Hutan | 9,000,000,000 |
| | | Total | 12,375,000,000 |
| 3 | Jumlah Polhut yang ditingkatkan Kapasitasnya | Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan LHK | 700,000,000 |

BAB V. PENUTUP

Rencana Kerja Tahun 2021 ini tak hanya berisi semangat untuk memperkuat apa yang telah dicapai di tahun-tahun sebelumnya, namun demikian didalamnya memuat komitmen meletakkan landasan pencapaian pembangunan tahun 2021.

Dengan demikian, Rencana Kerja Tahun 2021 ini menjadi media yang dapat memandu setiap gerak dan langkah Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan. Selanjutnya, seluruh intervensi (regulasi dan anggaran) dari seluruh unit kerja diharapkan dapat dipastikan kemanfaatannya didalam mendukung secara langsung pemenuhan kinerja.

Pemantauan dari upaya pencapaian kinerja ini akan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dalam bentuk audit kinerja, sedangkan Sekretariat Jenderal diharapkan dapat mengkoordinasikan pemantauan kinerja yang akan dituangkan ke dalam LAKIP Kementerian LHK tahun 2021.

LAMPIRAN I. MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021

| Program/ Kegiatan | Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama/Sasaran | Satuan | Target | Alokasi Anggaran | Lokasi |
|--|--|----------------|-----------|-----------------------|---|
| | Program/Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan (Output)/Komponen Kegiatan | | | | |
| Kenenterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | | | | | |
| | Sasaran Strategis 4. Terselenggaranya tata kelola & inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing | | | | |
| | - IKU 14: Jumlah Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Ditangani melalui Penegakan Hukum | | | | |
| Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan | | | | | |
| | Sasaran Program 2: Teramankannya hutan dari gangguan dan ancaman | | | | |
| | -IKP 2: Jumlah luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman | Hektar | 1,900,000 | 264,705,000 | Jakarta, Medan, Surabaya, Samarinda, Makasar, Manokwari |
| Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan (26,125,000) | | | | | Jakarta |
| | Sasaran Kegiatan : Terlaksananya operasi pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan | | | | |
| | IKK 1. Jumlah operasi pengamanan hutan | Operasi | 24 | 9,990,000,000 | Jakarta |
| | - Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Kawasan Hutan | Laporan | 25 | 1,500,000,000 | Jakarta, Medan, Surabaya, Samarinda, Makasar, Manokwari |
| | - Operasi Pengamanan Hutan | Operasi | 12 | 3,000,000,000 | Jakarta, Medan, Surabaya, Samarinda, Makasar, Manokwari |
| | - Operasi Penyelamatan SDA | Operasi | 9 | 4,600,000,000 | Jakarta, Medan, Surabaya, Samarinda, Makasar, Manokwari |
| | - Operasi Pengamanan Kawasan Hutan di DAS Citarum | Operasi | 3 | 750,000,000 | Jabodetabek, Bandung, Garut, Cimahi dan Sukabumi |
| | - Sosialisasi Pengaman DAS Citarum | Laporan | 2 | 140,000,000 | Jabodetabek, Bandung, Garut, Cimahi dan Sukabumi |
| | IKK 2. Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Ilegal | Operasi | 23 | 12,375,000,000 | Jakarta |
| | - Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan Ilegal | Laporan | 25 | 450,000,000 | Jakarta, Medan, Surabaya, Samarinda, Makasar, Manokwari |
| | - Operasi Pembalakan Liar | Operasi | 13 | 700,000,000 | Jakarta, Medan, Surabaya, Samarinda, Makasar, Manokwari |
| | - Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar | Operasi | 10 | 600,000,000 | Jakarta, Medan, Surabaya, Samarinda, Makasar, Manokwari |
| | - Penyusunan Bahan Penyiapan NSPK | Laporan | 1 | 250,000,000 | Jakarta |
| | - Sosialisasi dan Kerjasama Pencegahan dan Pengamanan Hutan | Laporan | 1 | 375,000,000 | Jakarta |
| | - Penguatan Sistem Intelijen | Laporan | 3 | 1,000,000,000 | Jakarta |
| | - Dukungan Teknis Pencegahan dan Pengamanan Hutan | Laporan | 7 | 9,000,000,000 | Jakarta |
| | IKK 3. Jumlah Polhut yang ditingkatkan Kapasitasnya | Orang | 21 | 700,000,000 | Jakarta |
| | - Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan LHK | Orang | 21 | 700,000,000 | Jakarta |

LAMPIRAN II. MATRIKS RENCANA KEGIATAN DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN TAHUN 2021

| Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Output | Uraian | Lokasi | Provinsi | Kabupaten /Kota | Target | Anggaran | Ket |
|---------------------------------|---|-------------------------------|---|--------------------------|---|--|------------|---------------|-----|
| Pencegahan dan Pengamanan Hutan | Terlaksananya Operasi Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal | Operasi Pengamanan Hutan | Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan TIPIHUT | 34 Provinsi di Indonesia | 34 Provinsi di Indonesia | 34 Provinsi di Indonesia | 25 Laporan | 1,456,270,000 | |
| | | | Operasional Satgas Patroli Siber Perdagangan TSL Online | Kantor Direktorat PPH | DKI Jakarta | Jakarta | 1 Kegiatan | 43,730,000 | |
| | | | Operasi Pemulihan Kawasan Hutan | 34 Provinsi di Indonesia | 34 Provinsi di Indonesia | 34 Provinsi di Indonesia | 12 Operasi | 2,550,000,000 | PN |
| | | | Mobilisasi tenaga pencegahan dan pengamanan hutan | 34 Provinsi di Indonesia | 34 Provinsi di Indonesia | 34 Provinsi di Indonesia | 1 Laporan | 225,000,000 | |
| | | | Pembinaan dan Supervisi Pencegahan dan Pengamanan Hutan | 34 Provinsi di Indonesia | 34 Provinsi di Indonesia | 34 Provinsi di Indonesia | 1 Laporan | 225,000,000 | |
| | | | Operasi Penyelamatan Sumber Daya Alam Hutan dan Hasil Hutan | 34 Provinsi di Indonesia | 34 Provinsi di Indonesia | 34 Provinsi di Indonesia | 9 Operasi | 3,553,090,000 | |
| | | | Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan | Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta | 1 Laporan | 1,046,910,000 | |
| | | | Operasi Pengamanan Kawasan Hutan di DAS Citarum | Garut, Bekasi, Bandung | Jawa Barat | Garut, Bekasi, Bandung | 3 Operasi | 750,000,000 | PN |
| | | | Sosialisasi Pengamanan DAS Citarum | Garut, Bekasi, Bandung | Jawa Barat | Garut, Bekasi, Bandung | 2 Laporan | 140,000,000 | |
| | | Operasi Peredaran Hasil Hutan | Pengumpulan Data dan Informasi Kerawanan TIPIHUT | 34 Provinsi di Indonesia | 34 Provinsi di Indonesia | 34 Provinsi di Indonesia | 25 Laporan | 450,000,000 | |
| | | | Operasi Pembalakan Liar | 34 Provinsi di Indonesia | 34 Provinsi di Indonesia | 34 Provinsi di Indonesia | 13 Operasi | 700,000,000 | PN |
| | | | Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar | 34 Provinsi di Indonesia | 34 Provinsi di Indonesia | 34 Provinsi di Indonesia | 10 Operasi | 600,000,000 | PN |
| | | | Penyusunan Bahan Penyiapan NSPK | Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta | 1 Laporan | 250,000,000 | |
| | | | Sosialisasi Pencegahan dan Pengamanan Hutan | Garut, Bekasi, Bandung | Jawa Barat | Garut, Bekasi, Bandung | 1 Laporan | 145,830,000 | |
| | | | Koordinasi Kerjasama Pencegahan dan Pengamanan Hutan | 5 Kantor Balai PPHLHK | DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Papua | Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar, Samarinda, Manokwari | 1 Laporan | 229,170,000 | |
| | | | Simulasi Implementasi laporan Sistem Intelijen | 5 Kantor Balai PPHLHK | DKI Jakarta, Sumatera Utara, | Jakarta, Medan, | 1 Laporan | 421,950,000 | |

| Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Output | Uraian | Lokasi | Provinsi | Kabupaten /Kota | Target | Anggaran | Ket |
|----------|------------------|--|---|-----------------------------------|--|--|-----------|---------------|-----|
| | | | | | Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Papua | Surabaya, Makassar, Samarinda, Manokwari | | | |
| | | | Pengelolaan Operasional Room Data manajemen penegakan hukum | Kantor Direktorat PPH | DKI Jakarta | Jakarta | 1 Laporan | 578,050,000 | |
| | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin | Kantor Direktorat PPH | DKI Jakarta | Jakarta | 1 Laporan | 252,250,000 | |
| | | | Fasilitasi penertiban dan Pengurusan senjata Api Dit. PPH | Kantor Direktorat PPH | DKI Jakarta | Jakarta | 1 Laporan | 418,630,000 | |
| | | | Pengadaan Seragam PDH Polhut KLHK | Kantor Direktorat PPH | DKI Jakarta | Jakarta | 1 Laporan | 4,867,000,000 | |
| | | | Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Data dan Informasi | Kantor Direktorat PPH | DKI Jakarta | Jakarta | 1 Laporan | 2,669,610,000 | |
| | | | Kordinasi Dukungan Teknis | Kantor Direktorat PPH | DKI Jakarta | Jakarta | 1 Laporan | 300,000,000 | |
| | | | Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 | Kantor Direktorat PPH | DKI Jakarta | Jakarta | 1 Laporan | 164,510,000 | |
| | | | Pengadaan Amunisi | Kantor Direktorat PPH | DKI Jakarta | Jakarta | 1 Laporan | 328,000,000 | |
| | | Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan | Penilaian Polhut dalam rangka Wana Lestari | Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta | 30 Orang | 315,400,000 | |
| | | | Peningkatan Kesamaptaan POLHUT dan SPORC | Sekolah Pembentukan Perwira POLRI | Jawa Barat | Sukabumi | 21 Orang | 110,380,000 | |
| | | | Inhouse Training Pencegahan dan Pengamanan Hutah | Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta | 30 Orang | 151,320,000 | |
| | | | Latihan menembak | Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta | 30 Orang | 122,900,000 | |

LAMPIRAN III. MATRIKS RENCANA AKSI KEGIATAN DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN TAHUN 2021

| Unit Kerja / IKK/ Output / Komponen | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | Target 2021 | Satuan |
|--|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------|
| Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK | | | | | | |
| Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan | | | | | | |
| Operasi Pengamanan Hutan | 6 | 7 | 6 | 6 | 25 | Operasi |
| Operasi Peredaran Hasil Hutan | 5 | 6 | 6 | 6 | 23 | Operasi |
| Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | Orang |

